

BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA TAHUN 2021: MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL, MENJAGA STABILITAS



Sinergi kebijakan nasional terus diperkuat pada tahun 2021 untuk tetap menjaga stabilitas dan terus mendorong perbaikan ekonomi nasional. Kuatnya sinergi kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Bank Indonesia dapat mendorong perbaikan ekonomi nasional dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Koordinasi fiskal dan moneter semakin diperkuat melalui partisipasi Bank Indonesia dalam pendanaan APBN sebagai pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK.

Sinergi kebijakan nasional yang semakin erat dalam mengatasi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 terus diperkuat pada tahun 2021 untuk tetap menjaga stabilitas dan terus mendorong perbaikan ekonomi nasional. Dalam kaitan tersebut, terdapat satu kondisi prasyarat (necessary condition), yaitu vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19, serta 5 (lima) kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan (sufficient conditions), yaitu: (i) pembukaan sektor produktif dan aman, (ii) percepatan realisasi stimulus fiskal, (iii) peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM. Pelaksanaan vaksinasi sebagai necessary condition terus dilakukan pada 2021 dengan akselerasi vaksinasi seiring dengan pasokan dan distribusi vaksin global yang semakin baik khususnya sejak merebaknya Covid-19 varian delta. Pembukaan sektor produktif dan aman terus diupayakan di tengah upaya keras mengatasi pandemi Covid-19, terutama sektor properti dan otomotif, disertai dengan koordinasi erat KSSK untuk mendorong pembiayaan ke dunia usaha. Sementara itu, sinergi digitalisasi sistem pembayaran dengan Gernas BBI dan BWI antara Bank Indonesia, Pemerintah, industri perbankan, perusahaan jasa pembayaran, fintech, dan e-commerce sangat erat untuk akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kuatnya sinergi kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah, KSSK, dan Bank Indonesia dapat mendorong perbaikan ekonomi nasional dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Pada tahun 2021, Pemerintah melanjutkan stimulus fiskal yang cukup besar untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 baik terhadap kesehatan maupun perekonomian. Defisit fiskal pada 2021 diprakirakan mencapai Rp783,70 triliun atau 4,65% PDB. Termasuk di dalamnya, anggaran penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp744,77 triliun antara lain untuk anggaran kesehatan sebesar Rp214,96 triliun dan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp186,64 triliun. Untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan kepada dunia usaha, koordinasi erat KSSK ditempuh untuk perbaikan sektor properti dan otomotif melalui insentif fiskal oleh Pemerintah dan

"Sinergi kebijakan ekonomi nasional mendorong perbaikan ekonomi dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga"

pelonggaran kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia. Sementara itu, OJK terus memberikan relaksasi bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit dengan penundaan angsuran pokok dan bunga sehingga tidak berdampak pada kenaikan kredit bermasalah dan penurunan permodalan dengan memperpanjang POJK No. 48 Tahun 2021 hingga berlaku sampai Maret 2023. Demikian pula, LPS memastikan terjaminnya simpanan masyarakat pada perbankan sehingga mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan serta menurunkan tingkat bunga penjaminan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Koordinasi fiskal dan moneter semakin diperkuat, tidak saja dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, tetapi juga melalui partisipasi Bank Indonesia dalam pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana sebagai pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020. Sepanjang tahun 2021 ini Bank Indonesia kembali mendukung pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana berdasarkan Keputusan Bersama (KB I) sebesar Rp143,32 triliun, yang terdiri dari Rp67,87 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO). Lebih dari itu, dalam mengatasi meningkatnya kebutuhan APBN untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan akibat merebak dengan cepatnya pandemi Covid-19 varian Delta, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan pembelian SBN secara langsung dari Pemerintah sesuai Keputusan Bersama III (KB III). Komitmen pembelian SBN tersebut adalah sebesar Rp215 triliun untuk APBN tahun 2021 dan sebesar Rp224 triliun untuk APBN tahun 2022, dengan suku bunga rendah sebesar Bank Indonesia Reverse Repo Rate tenor 3 bulan. Selain suku bunga rendah, Bank Indonesia juga mengembalikan sebagian penerimaan kupon yang diterima dari pembelian SBN tersebut, yaitu dari SBN senilai

Rp58 triliun untuk APBN 2021 dan Rp40 triliun untuk APBN 2022, sehingga tidak ada beban bunga dalam APBN bagi Pemerintah. Hal ini menunjukkan kuatnya komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pendanaan APBN baik dalam pembiayaan kesehatan dan kemanusian akibat pandemi Covid-19 maupun dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, tentunya implementasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK. Pokok-pokok bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia meliputi:

- Di bidang moneter, kebijakan suku bunga rendah, stabilitas nilai tukar Rupiah, dan injeksi likuiditas (quantitative easing) terus dilakukan. Kebijakan suku bunga rendah tetap dipertahankan sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan BI7DRR sebanyak 6 (enam) kali sejak 2020 menjadi 3,50%, terendah sepanjang sejarah. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan melalui triple intervention, di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih ada. Demikian juga, injeksi likuiditas (quantitative easing) dilanjutkan untuk memperkuat kemampuan perbankan dalam meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Sejak tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2021, kebijakan quantitative easing telah mencapai Rp874,4 triliun atau sekitar 5,3% dari PDB, melalui injeksi likuiditas ke perbankan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
- ii. Pelonggaran kebijakan makroprudensial terus dilanjutkan untuk mendorong peningkatan pembiayaan perbankan bagi dunia usaha, yang disinergikan dengan kebijakan KSSK. Antara lain dengan melonggarkan ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Rasio LTV/FTV Kredit Properti, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/ RIM Syariah), mendorong penurunan Suku Bunga Dasar Kredit perbankan, dan kebijakan makroprudensial akomodatif yang lain. Bank Indonesia juga melakukan

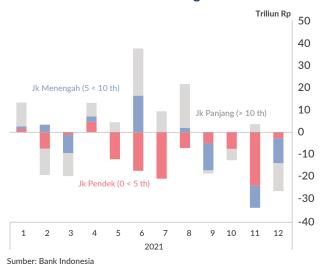
- penyempurnaan kebijakan Rasio Kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
- iii. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekonomi keuangan digital nasional terus dilakukan termasuk melalui perluasan akseptasi QRIS 12 juta merchant pada akhir 2021, termasuk cross-border QRIS, implementasi Standar Nasional Open API (SNAP), melanjutkan elektronifikasi bantuan sosial, moda transportasi, dan operasi keuangan pemerintah. Percepatan berbagai agenda dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 juga dilakukan, antara lain dengan pengembangan BI-FAST yang bersifat real time dan 24/7, interlink digital banking dan fintech, dan reformasi regulasi sistem pembayaran.
- iv. Selain tiga kebijakan utama di atas, Bank Indonesia juga mengarahkan seluruh 4 (empat) kebijakan pendukung untuk pemulihan ekonomi nasional. Sinergi erat dengan Pemerintah, perbankan, dan institusi lainnya ditingkatkan untuk mengembangkan UMKM serta Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendalaman pasar keuangan juga dipercepat, khususnya pasar uang Rupiah dan valas, untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur. Kebijakan internasional diarahkan tidak saja untuk memperkuat diplomasi kebijakan Bank Indonesia, tetapi juga mendukung Pemerintah dalam fasilitasi dan promosi perdagangan dan investasi di berbagai negara.
- v. Di samping itu, guna mendukung kebijakan Pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian kegiatan operasional dan layanan publik seperti layanan kas, sistem pembayaran, transaksi operasi moneter, dan layangan kebanksentralan kepada Pemerintah. Bank Indonesia juga menaikkan sementara batas maksimal nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM yang menggunakan teknologi *chip* sampai dengan 30 September 2021.

Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

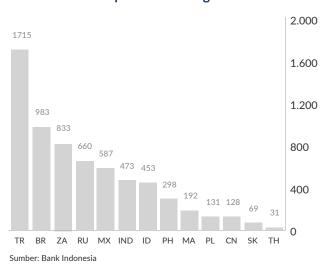
Dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah menguat signifikan sehingga kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui *triple intervention*, baik di pasar spot, pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder didukung juga dengan komunikasi intensif kepada para investor dan pelaku pasar domestik dan luar negeri. Sebagaimana tergambar pada bab sebelumnya, Rupiah yang pada 15 April 2021 mencapai Rp14.610 terus menunjukkan tren penguatan menjadi Rp14.253 pada 31 Desember

2021. Keyakinan dan persepsi investor yang terjaga mendorong masuknya aliran portofolio asing ke Indonesia, meski secara neto di sepanjang 2021 masih mencatatkan outflow (Grafik 3.1). Cadangan devisa juga meningkat mencapai 144,9 miliar dolar AS pada Desember 2021, lebih tinggi dibandingkan posisi pada akhir tahun 2020 sebesar 135,9 miliar dolar AS. Ke depan, nilai tukar Rupiah akan relatif stabil didukung oleh inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan yang rendah, imbal hasil aset keuangan domestik yang terjaga, dan premi risiko yang stabil (Grafik 3.2).

Grafik 3.1. Aliran Investasi Asing ke SBN



Grafik 3.2. Yield Spread SBN dengan UST



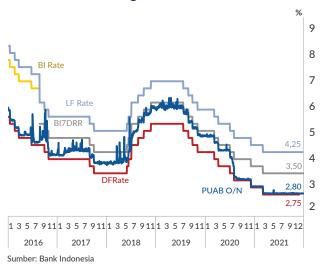


Stimulus Kebijakan Moneter

Suku bunga kebijakan moneter rendah dan pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia mendorong terus turunnya penurunan suku bunga perbankan dan terjaganya stabilitas pasar keuangan. Sejak tahun 2020 Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan moneter sebanyak 6 (enam) kali sehingga suku bunga BI7DRR menjadi 3,50%. Penurunan suku bunga BI7DRR dan pelonggaran likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia diikuti oleh penurunan tingkat bunga di berbagai pasar. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB overnight dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 26 bps dan 131 bps sejak Desember 2020 menjadi 2,78% dan 2,96% pada Desember 2021 (Grafik 3.3). Demikian pula imbal hasil SBN tenor 10 tahun juga turun sebesar sebesar 200 bps dari tertinggi 8,38% pada akhir Maret 2020 menjadi 6,38% pada akhir Desember 2021. Di pasar kredit, penurunan SBDK perbankan terus berlanjut, diikuti penurunan suku bunga kredit baru.

Bank Indonesia juga terus melanjutkan stimulus moneter dalam bentuk kebijakan Quantitative Easing (QE) ke perbankan dalam jumlah yang besar guna mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp147,8triliun. Dengan perkembangan tersebut, sejak tahun 2020 kebijakan quantitative easing telah mencapai Rp874,4 triliun atau sekitar 5,3% dari PDB, salah satu injeksi likuiditas yang terbesar di negara berkembang. Meskipun besarnya likuiditas

Grafik 3.3. Suku Bunga PUAB O/N



perbankan tersebut belum mampu sepenuhnya mendorong penyaluran kredit perbankan karena masih lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha, longgarnya likuiditas berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selain injeksi likuiditas kepada perbankan, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp358,32 triliun yang terdiri dari Rp67,87 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO) sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 (KB I), serta Rp215 triliun melalui mekanisme Private Placement (PP) sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021 (KB III).

Pelonggaran Kebijakan Makroprudensial

Stance kebijakan makroprudensial tetap akomodatif dan tersinergi dengan kebijakan KSSK untuk mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai penguatan pelonggaran kebijakan makroprudensial telah ditempuh. Pertama, pelonggaran LTV untuk kredit properti dan uang muka KKB menjadi 0% berlaku efektif 1 Maret 2021. Kebijakan ini ditempuh dengan bersinergi dengan Pemerintah dan OJK yang telah menerbitkan paket kebijakan untuk mendorong kinerja sektor properti dan otomotif sebagai sektor yang memiliki keterkaitan yang cukup tinggi (backward dan forward linkage) terhadap sektor ekonomi yang lain. Kedua, publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit perbankan sejak Februari 2021 untuk memperkuat transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. Ketiga, reaktivasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) secara bertahap dengan menaikkan batas bawah RIM menjadi 75% pada Mei 2021, 80% pada September 2021, dan 84% pada Januari 2022. Penguatan juga dilakukan dengan memasukkan wesel ekspor milik bank ke dalam perhitungan RIM. Berbagai kebijakan tersebut disinergikan dengan upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan melalui besaran Countercyclical Buffer (CCyB) yang tetap 0% dan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% yang seluruhnya dapat direpokan kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga telah menyempurnakan kebijakan Rasio Kredit UMKM menjadi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

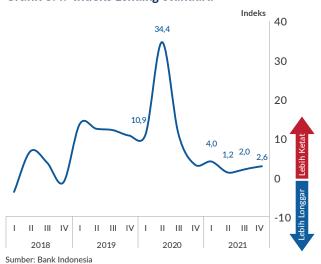
Penyempurnaan kebijakan untuk mendorong inklusivitas tersebut ditempuh dengan memperluas target pembiayaan tidak hanya bagi UMKM namun juga bagi korporasi UMKM dan PBR (Perorangan Berpenghasilan Rendah). Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan keleluasaan, agar perbankan dapat berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM dan PBR sesuai dengan keahlian dan model bisnisnya

melalui perluasan opsi-opsi mekanisme pembiayaan UMKM dan PBR. Dalam hal ini, perbankan dapat berkontribusi dalam melakukan pembiayaan inklusif secara lebih optimal melalui 3 (tiga) skema modalitas, yaitu (1) pembiayaan inklusif secara langsung dan rantai pasok, (2) pembiayaan melalui Lembaga Keuangan dan Badan Layanan, termasuk BPR/ BPRS, fintech, PNM, dan SMF, dan (3) pembiayaan melalui pembelian surat berharga yang terkait dengan pembiayaan inklusif, seperti SBN Inklusif, MTN Inklusif, dan EBA Inklusif. Ke depan, perluasan skema pembiayaan inklusif secara tidak langsung ini diharapkan dapat memunculkan inovasi di perbankan serta pendalaman pasar keuangan. Implementasi RPIM akan dilakukan secara bertahap, sehingga target porsi UMKM dan inklusi lainnya pada kredit perbankan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dapat tercapai pada akhir bulan Juni 2024.

Suku bunga kebijakan yang dipertahankan rendah serta pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia mampu mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Kondisi likuiditas perbankan pada Desember 2021 longgar, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi mencapai 35,12% serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 12,21% (yoy). Likuiditas perekonomian meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh meningkat masing-masing sebesar 17,9% (yoy) dan 13,9% (yoy). Pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya ekspansi fiskal dan peningkatan kredit perbankan.

Mulai pulihnya intermediasi perbankan didorong oleh perbaikan baik sisi permintaan maupun sisi penawaran kredit. Permintaan kredit membaik, terutama dari dunia usaha dan konsumsi sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit oleh

Grafik 3.4. Indeks Lending Standard

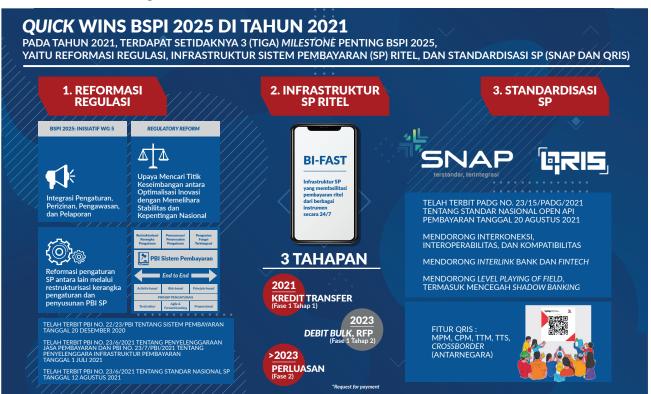


perbankan melonggar seiring dengan menurunnya persepsi risiko, di samping sangat longgarnya likuiditas dan penurunan suku bunga kredit baru (Grafik 3.4). Seluruh kelompok penggunaan kredit telah tumbuh positif, terutama Kredit Konsumsi dan Kredit Modal Kerja. Kenaikan kredit yang lebih tinggi tercatat pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu sebesar 9,13% (yoy) pada Desember 2021 sejalan dengan kebijakan terpadu KSSK untuk mendorong sektor properti. Demikian pula, pertumbuhan

kredit UMKM meningkat pada Desember 2021, menunjukkan perbaikan lebih lanjut dunia usaha pada sektor UMKM. Ke depan, sejalan dengan semakin pulihnya ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, percepatan realisasi APBN dan APBD oleh Pemerintah, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang longgar termasuk likuiditas perbankan yang lebih dari cukup oleh Bank Indonesia, serta kemajuan restrukturisasi kredit oleh perbankan, Bank Indonesia memprakirakan penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan dari pasar modal akan berangsur meningkat ke depan.

Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus ditempuh Bank Indonesia guna mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Sebagai implementasi BSPI 2025, pada tahun 2021 digitalisasi sistem pembayaran ditekankan pada 3 (tiga) prioritas dan capaian penting, yaitu reformasi regulasi (regulatory reform), infrastruktur sistem pembayaran ritel, dan standardisasi sistem pembayaran (Gambar 3.1). Pada aspek reformasi regulasi, transformasi kebijakan ditempuh untuk konsolidasi industri sistem pembayaran nasional disertai dengan kemudahan dan penyederhanaan prosedur perizinan. Untuk itu,

Gambar 3.1. Perkembangan BSPI 2025



Sumber: Bank Indonesia

Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran

Bank Indonesia memperkuat PBI Sistem Pembayaran (SP), yang telah terbit pada akhir tahun 2020, dengan penerbitan PBI Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) pada 1 Juli 2021. Kedua PBI tersebut ditujukan untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran Indonesia secara end-to-end serta mendorong praktik bisnis yang sehat melalui kolaborasi dengan industri untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif. Penyederhanaan perizinan ditempuh dengan menerapkan kaidah pengaturan prinsip (principle based) dengan pemberian izin atas kelompok jenis layanan pembayaran daripada pengaturan sebelumnya dengan persyaratan yang kaku (rule based) untuk setiap jenis layanan. Penyederhanaan pemrosesan izin ini diterapkan baik terhadap PJP, penetapan PIP serta dalam pemrosesan pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama berbasis risiko.

Bank Indonesia juga terus mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi, terinteroperabilitas, dan terinterkoneksi untuk mendukung ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional. Dalam hal ini, Bank Indonesia memodernisasi infrastruktur pembayaran ritel yang serta merta (real time) dan beroperasi tanpa henti (24/7) dengan meluncurkan BI-FAST pada Desember 2021. BI-FAST dibangun untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara end-to-end, bersifat national driven sebagai wujud implementasi BSPI 2025, dan mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal (cemumuah). Pada tahap awal, layanan BI-FAST difokuskan untuk layanan transfer kredit individual. Berbagai kebijakan penyelenggaraan telah ditetapkan guna persiapan implementasi BI-FAST

seperti kepesertaan yang terbuka, opsi penyediaan infrastruktur secara independen maupun bersama/ sharing, penetapan batas maksimal transaksi sebesar Rp250 juta per transaksi serta skema harga BI-FAST sebesar maksimal Rp2.500 per transaksi kepada nasabah dengan biaya Bank Indonesia ke peserta sebesar Rp19 per transaksi. Calon peserta BI-FAST telah ditetapkan sebanyak 22 peserta batch 1 pada Desember 2021 dan 22 peserta batch 2 pada Januari 2022. Implementasi BI-FAST juga selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, baik di sektor moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, dalam modernisasi infrastruktur pembayaran nasional sesuai standar internasional Core Principles of Payments and Financial Market Infrastructure dan sekaligus untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang integrated, interoperable dan interconnected (3i).

Selain BI-FAST, Bank Indonesia juga mengimplementasikan Standar Nasional Open API (SNAP) untuk mendukung percepatan pembentukan ekosistem EKD yang terstandarisasi. SNAP merupakan standar nasional atas protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antaraplikasi secara terbuka dalam pemrosesan transaksi pembayaran yang disusun oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Penetapan SNAP ini ditujukan untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman, dan andal. SNAP yang telah diluncurkan pada 17 Agustus 2021 akan diadopsi secara bertahap mulai Juni 2022 untuk penyelenggara jasa pembayaran first mover dan Desember 2022 untuk PJP lainnya. Bank Indonesia optimis bahwa implementasi SNAP akan mendorong interkoneksi, interoperabilitas, dan kompabilitas penyelenggara

Open API pembayaran sehingga memperkuat interlink antara PJP bank dengan nonbank. Selain itu, SNAP juga membentuk level of playing field yang sama antarpelaku industri pembayaran sehingga mengurangi fragmentasi dan mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

Digitalisasi sistem pembayaran juga didukung dengan perluasan penggunaan QRIS sebagai standar nasional QR Pembayaran dalam pembayaran berbagai transaksi ekonomi-keuangan digital. Perluasan QRIS ditempuh dengan kampanye secara masif untuk mencapai target penggunaan QRIS sebanyak 12 juta merchant tersambung dalam ekosistem EKD nasional pada tahun 2021. Sejumlah kemudahan dan insentif juga ditempuh, termasuk memperpanjang merchant discount rate (MDR) QRIS 0% bagi usaha mikro hingga 31 Desember 2021 maupun menaikkan limit transaksi QRIS dari Rp2 juta per transaksi menjadi Rp5 juta per transaksi untuk memperluas transaksi QRIS di segmen menengah sejak 1 Mei 2021. Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah juga terus diperkuat melalui penggunaan QRIS dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Berwisata di Indonesia (BWI). Perluasan QRIS oleh Pemerintah Daerah juga diperluas sebagai bagian dari implementasi Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Berbagai kebijakan dan koordinasi tersebut membuahkan hasil yang positif. Target 12 juta merchant yang tersambung dengan QRIS telah tercapai pada awal November 2021, dan lebih jauh melampaui target hingga akhir 2021 (Tabel 3.1).

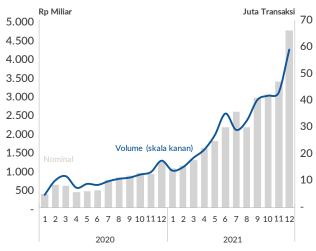
Tabel 3.1. Merchant Terdaftar QRIS

Kriteria Merchant	5 November 2021	31 Desember 2021
Usaha Besar	449.331	496.405
Usaha Menengah	928.005	1.048.560
Usaha Kecil	3.203.652	3.624.295
Usaha Mikro	7.532.134	8.476.367
Donasi/Sosial, Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO)	124.484	1.134.351
TOTAL	12.237.586	14.779.978
Sumber: Bank Indonesia		

QRIS yang beroperasi di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota, digunakan oleh 88% usaha mikro dan kecil, serta diselenggarakan oleh 68 penyelenggara jasa pembayaran baik bank maupun lembaga selain bank. Lebih dari itu, penggunaan QRIS juga semakin meningkat baik dari sisi volume maupun nominalnya yang menunjukkan semakin diterimanya QRIS oleh masyarakat (Grafik 3.5).

Bank Indonesia juga terus memperluas program elektronifikasi pembayaran untuk penyaluran bansos, moda transportasi, dan transaksi keuangan Pemerintah Daerah guna mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia mendukung upaya Pemerintah untuk menyalurkan bansos yang lebih cepat, tepat sasaran, dan bertata kelola baik melalui program elektronifikasi bansos. Untuk itu, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi bansos 4.0 melalui penguatan model bisnis, regulasi, dan metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan termasuk peningkatan kualitas data. Sementara pada elektronifikasi transportasi, Bank Indonesia mendorong integrasi sistem dan data pembayaran di sektor transportasi. Bank Indonesia memberikan dukungan penyusunan model bisnis aspek pembayaran untuk moda transportasi terintegrasi serta multi lane free flow jalan tol yang akan mulai beroperasi bertahap tahun 2022. Lebih lanjut, untuk memperkuat elektronifikasi transaksi pemda, Bank Indonesia pada tahun 2021 memperkuat sinergi program strategis satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Hingga 14 Oktober 2021, pembentukan Tim Percepatan

Grafik 3.5. Perkembangan QRIS



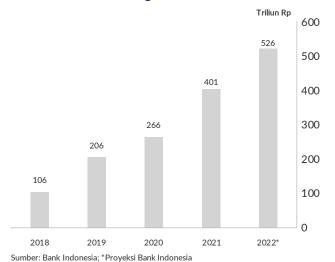
Sumber: Bank Indonesia

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021

dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sudah mencapai 482 atau 88% dari total Pemda di Indonesia dengan komposisi 33 pemerintah provinsi, 360 pemerintah kabupaten, dan 89 pemerintah kota. Sinergi antar-otoritas dan *stakeholder* terkait juga terus dilakukan antara lain dengan menyukseskan penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 yang menjadi wadah sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Berbagai program digitalisasi sistem pembayaran di atas mampu mendorong akselerasi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional saat ini dan ke depannya. Transaksi e-commerce yang pada tahun 2021 tumbuh 50,8% dan diprakirakan akan terus meningkat pada 2022 hingga mencapai Rp526 triliun, atau tumbuh 31,2% (Grafik 3.6). Sejalan dengan perkembangan tersebut, transaksi pembayaran digital banking pada 2021 naik 45,64% (yoy) dan diprakirakan berlanjut naik 24,8% hingga mencapai

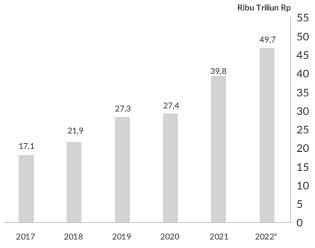
Grafik 3.6. Perkembangan E-Commerce



Rp49,7 ribu triliun pada 2022 (Grafik 3.7). Sementara, penggunaan UE pada 2021 naik 49,06% (yoy) dan diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi 17,13% (yoy) hingga mencapai Rp358 triliun pada 2022 (Grafik 3.8). Semakin pesatnya perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital ini sejalan dengan terus meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, meluasnya ekosistem *e-commerce*, semakin berkembangnya layanan pembayaran digital, membaiknya kondisi ekonomi domestik, dan akselerasi berbagai program digitalisasi sistem pembayaran sesuai BSPI 2025.

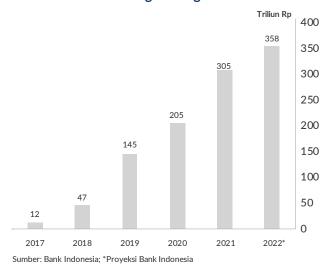
Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia juga melanjutkan transformasi pengelolaan uang Rupiah melalui sentralisasi, otomasi, dan efisiensi pencetakan dan pengedaran uang ke seluruh wilayah NKRI. Transformasi diarahkan untuk menyediakan uang layak edar, denominasi sesuai, just in time melalui central bank driven, menyelaraskan arah kebijakan nontunai, serta memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional berdasarkan Blueprint Pengelolaan Uang Rupiah (BP PUR) 2025. Transformasi diimplementasikan berdasarkan 3 (tiga)

Grafik 3.7. Perkembangan Digital Banking



Sumber: Bank Indonesia; *Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 3.8. Perkembangan Uang Elektronik



key milestones yakni sentralisasi distribusi, digitalisasi, dan efisiensi yang didukung oleh penguatan sistem

informasi, ketentuan, organisasi, serta sumber daya manusia di bidang pengelolaan uang Rupiah. Sentralisasi distribusi ditempuh melalui penyelarasan jalur dan layer distribusi, penguatan command center, sentralisasi pengelolaan persediaan kas, serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan moda transportasi berbasis 4.0. Sementara, digitalisasi pengelolaan uang Rupiah dilakukan secara end to end mulai dari tahap perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Dalam konteks upaya peningkatan efisiensi, Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan pengelolaan uang Rupiah termasuk efisiensi manajemen persediaan uang Rupiah, distribusi, dan layanan kas, pemenuhan kebutuhan kas berbasis spasial, serta penguatan kualitas bahan uang dan unsur pengamanan. Berbagai transformasi pengelolaan uang Rupiah berdasarkan 3 key milestones tersebut merupakan wujud komitmen kuat Bank Indonesia untuk menjaga integritas dan kredibilitas Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus sebagai pemersatu dan kebanggaan bagi NKRI dan bangsa Indonesia.

Akselerasi Pendalaman Pasar Uang

Bank Indonesia mengakselerasi pendalaman pasar uang untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan mendukung pemulihan ekonomi. Berbagai program dilakukan sebagai implementasi Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 dengan 3 (tiga) inisiatif utama, yaitu: (i) mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, (ii) memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan (iii) mengembangkan instrumen keuangan sebagai sumber pembiayaan ekonomi dan penguatan manajemen risiko (Gambar 3.2). Dalam upaya memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia pada 2021 fokus pada percepatan pengembangan transaksi repo dan DNDF antar pelaku pasar. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan penguatan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) sebagai acuan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.8 Pengembangan

instrumen DNDF juga dilanjutkan melalui upaya peningkatan suplai di pasar untuk menyeimbangkan sisi suplai dan permintaan di pasar DNDF, termasuk dengan memperbolehkan peserta DNDF untuk me-roll over DNDF yang akan jatuh tempo. Selain itu, skema Local Currency Settlement (LCS) juga terus diperkuat dan diperluas untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu. 9,10 Selain itu, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan OJK melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) terus mengembangkan instrumen keuangan untuk pembiayaan ekonomi, termasuk di antaranya instrumen Surat Berharga Komersial (SBK) dan perluasan transaksi repo antarbank dengan SBN sebagai transaksi yang mendasari (underlying transactions), serta kampanye untuk mobilisasi investor ritel SBN.

Gambar 3.2. Keterkaitan Antar-Inisiatif BPPU 2025



⁸ Penguatan yang dilakukan baik pada periode pemantauan transaksi maupun waktu penerbitan JISDOR ini ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas pasar valas dan mendukung stabilitas nilai tukar.

Penguatan kerangka LCS telah dilakukan pada skema LCS Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Jepang, sementara perluasan negara mitra LCS ditempuh dengan implementasi LCS Indonesia-Tiongkok pada September 2021

¹⁰ Pengembangan JISDOR, DNDF, dan LCS ini juga sekaligus sebagai bagian kontribusi Bank Indonesia dalam upaya memperkaya instrumen keuangan sebagai sumber pembiayaan ekonomi dan penguatan manajemen risiko

Dalam rangka mendorong digitalisasi dan infrastruktur pasar uang, Bank Indonesia telah menyusun kerangka pengaturan melalui penerbitan PBI Pasar Uang beserta implementasinya bersama industri. Salah satunya adalah pendirian Electronic Trading Platform (ETP) Multi-matching dengan transaksi pasar uang dan pasar valas dilakukan secara bersama dengan standarisasi instrumen dan penentuan harga secara lebih terbuka di antara para pelaku pasar, beralih dari transaksi yang selama ini dilakukan secara bilateral (over the counter, OTC). Implementasi ETP Multi-matching ini akan mendorong pembentukan harga yang efisien dan transparan serta penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Pada tahap awal, ETP Multi-matching diimplementasikan pada transaksi valuta asing khususnya spot, yang kemudian akan dikembangkan lebih lanjut agar

mencakup jenis transaksi yang lain, termasuk repo, swap, dan DNDF. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas terkait lainnya dan industri juga tengah mempercepat pendirian central counterparty (CCP) guna meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat transparansi, dan mengurangi risiko transaksi repo dengan SBN sebagai underlying transactions (Gambar 3.3).11 Pengembangan CCP-SBN NT akan meningkatkan volume dan likuiditas transaksi repo SBN antarbank, memperkuat transparansi pembentukan suku bunga di pasar, dan menghilangkan risiko antarpihak (counterparty risk) yang timbul dalam transaksi repo secara bilateral melalui OTC.12 Upaya penguatan infrastruktur pasar tersebut di samping akan dapat mempercepat pendalaman pasar uang Indonesia, juga konsisten dengan agenda G20 OTC Derivative Market Reform.

Gambar 3.3. Pengembangan CCP-SB NT Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Berbeda dengan transaksi repo SBN yang selama ini dilakukan secara bilateral melalui OTC, transaksi repo melalui CCP dilakukan secara bersama melalui ETP Multi-matching dengan standardisasi produk, kontrak transaksi, transaksi harga, serta mekanisme penyelesaian transaksi secara neto (closedout netting) atas dasar SBN yang diserahkan sebagai underlying transaction dari peserta pasar kepada lembaga CCP yang akan dibentuk.

Diharapkan pendirian CCP-SBN NT ini akan menurunkan perbedaan imbal SBN (yaitu sekitar 5,2% untuk tenor 5 tahun) dengan suku bunga di pasar uang (yaitu sekitar 3,7% untuk tenor 12 bulan) yang saat ini sangat besar, dan karenanya akan mendukung upaya Pemerintah untuk mengurangi beban bunga utang pemerintah

Pemberdayaan Ekonomi-Keuangan Syariah dan UMKM

Bank Indonesia terus mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan, bagian dari reformasi struktural menuju Indonesia Maju. 13 Penguatan dan perluasan ekosistem mata rantai nilai halal (halal value chain), terus dilakukan melalui 3 (tiga) pilar pengembangannya. Strategi penguatan dilakukan di masing-masing pilar tersebut baik dalam aspek penguatan kelembagaan, perluasan implementasi, serta penguatan infrastruktur pendukung termasuk digitalisasi. Pada pilar pertama pemberdayaan ekonomi syariah, penguatan ekosistem halal value chain pada aspek kelembagaan dilakukan dengan akselerasi penguatan korporatisasi pelaku usaha syariah berbasis pesantren. Hal ini diimplementasikan melalui pembentukan Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) di berbagai wilayah provinsi. Sementara penguatan secara sektoral dilakukan melalui dukungan akselerasi Halal Assurance System untuk sektor makanan halal bersama BPJPH, serta K/L dan stakeholder lainnya, termasuk dalam mendukung implementasi Kawasan Industri Halal (KIH). Dukungan peningkatan kinerja sektoral ekonomi syariah juga dilakukan melalui penguatan rantai pasok nilai halal di sektor pertanian, serta pelaksanaan business matching, business intermediary, dan on-boarding e-commerce domestik dan global. Begitu juga penguatan sektor fesyen muslim yang dilakukan melalui penguatan kapasitas pelaku usaha syariah siap ekspor dan perluasan akses pasar.

Pada pilar kedua keuangan syariah, penguatan operasi moneter dan pendalaman pasar uang syariah untuk mendukung pembiayaan terus ditempuh.
Hal ini dilakukan antara lain dengan perluasan implementasi Sukuk BI (SukBI). Di samping itu persiapan pelaksanaan RPIM pada perbankan syariah

Pada pilar ketiga edukasi dan sosialisasi, kontribusi penyelenggaraan FESyar dan ISEF tahun 2021 terhadap ekonomi dan keuangan syariah nasional semakin nyata. Rangkaian kegiatan Road to ISEF, termasuk 3 (tiga) kali penyelenggaraan FESyar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kawasan Timur Indonesia, mencakup berbagai kegiatan, dari webinar hingga business matching dan business deals. Perluasan pasar, di domestik hingga menembus pasar global, termasuk onboarding ke platform e-commerce global. Dari keuangan syariah, kolaborasi "Bulan Pembiayaan Syariah" digelar bersama OJK dan berbagai stakeholder terkait lainnya termasuk dari wakaf produktif. Rangkaian kegiatan FESyar virtual dengan ISEF yang kali ini diselenggarakan secara hybrid, diikuti oleh lebih dari 290 ribu peserta dan 970 peserta eksibisi. Pada ISEF ke-8 tersebut, kegiatan untuk akselerasi ekonomi syariah difokuskan pada sektor makanan halal dan fesyen muslim (Gambar 3.4). Termasuk penyelenggaraan "Global Halal Dialogue", serta "Indonesia Sustainable Modest Fashion Show" oleh 420 desainer seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan FESyar dan ISEF menghasilkan total transaksi senilai Rp25,8 triliun dan pengumpulan ZISWAF sebesar Rp669 miliar. Keseluruhan pencapaian ini jauh meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang semakin membanggakan adalah bertambah banyaknya lembaga, asosiasi, dan berbagai pihak, nasional maupun internasional, yang bergabung dan

melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk underlying project SukBI Inklusif dalam rangka mendorong pembiayaan syariah bagi UMKM, sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, terus dilakukan. Upaya optimalisasi keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan juga terus didorong melalui penguatan wakaf produktif bersama K/L terkait. Selanjutnya sebagaimana amanah UU No. 2 Tahun 2020, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pemulihan ekonomi, dilakukan penyempurnaan ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) bagi perbankan syariah.

¹³ Elaborasi lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga dapat dilihat pada Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2021 pada Bab 3 Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Bab 4 Arah Kebijakan 2022

Gambar 3.4. Fesyar dan ISEF 2021: Indonesia Pusat Ekonomi Keuangan Syariah Dunia

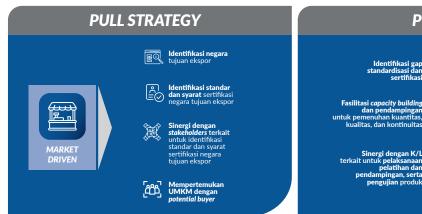


berjamaah di dalam ISEF untuk akselerasi ekonomi dan keuangan syariah mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia terus memperkuat program pengembangan UMKM untuk mendorong UMKM digital dan ekspor. Bank Indonesia konsisten melaksanakan program pengembangan UMKM melalui 3 (tiga) pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif. Penguatan korporatisasi dilakukan melalui pembentukan kelompok yang didasari modal sosial yang kuat serta penguatan kelembagaan formal dan modern. UMKM didorong untuk berkolaborasi antarUMKM maupun dengan usaha besar dan lembaga keuangan untuk meningkatkan skala ekonominya. Peningkatan kapasitas difokuskan

untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan digitalisasi proses bisnis sehingga mendorong perbaikan daya saing UMKM. Program digitalisasi UMKM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas akses pemasaran UMKM baik nasional maupun global, mempermudah akses pembiayaan UMKM, dan mempermudah transaksi UMKM sebagai entry point ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui perluasan adopsi QRIS. Pada aspek pembiayaan, perluasan akses terus didorong untuk kemudahan ekspansi usaha dengan pembiayaan UMKM yang lebih sehat. Bank Indonesia juga terus mendorong UMKM ekspor dengan menerapkan 2 (dua) strategi, yaitu pull strategy (market driven) untuk mengidentifikasi standar dan persyaratan sesuai negara tujuan ekspor dan push strategy melalui fasilitasi pemenuhan sertifikasi yang dibutuhkan UMKM (Gambar 3.5).

Gambar 3.5. Strategi Pengembangan UMKM Ekspor



Identifikasi gap standardisasi dan sertifikasi

Fasilitasi capacity building dan pendampingan untuk pemenuhan kuantitas kualitas, dan kontinuitas

Sinergi dengan K/L terkait untuk pelaksanaan pendampingan, serta pengujian produk

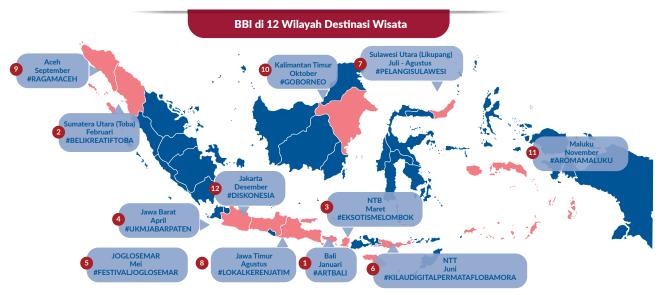
Sinergi dengan K/L terkait untuk pelaksanaan pendampingan, serta pengujian produk

Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, asosiasi, dan komunitas untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sinergi dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas UMKM, onboarding UMKM, business matching, fasilitasi akses pembiayaan, pameran, dan promosi perdagangan internasional. Bank Indonesia juga konsisten mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BWI) dengan melibatkan seluruh kantor Bank Indonesia dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi, antara lain melalui melalui penyelenggaraan

berbagai *event* strategis Bank Indonesia, perluasan penggunaan QRIS UMKM, program belanja produkproduk UMKM, serta peluncuran aplikasi *E-Catalogue* Bank Indonesia untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan transaksi UMKM melalui program "Bela Pengadaan" dan "Bangga Menggunakan Produk Indonesia" (Gambar 3.6) Sejalan dengan peran strategis Bank Indonesia dalam tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bank Indonesia akan terus memperkuat peran aktif dalam mendukung kesuksesan Gernas BBI dan BWI.

Gambar 3.6. Persebaran Wilayah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

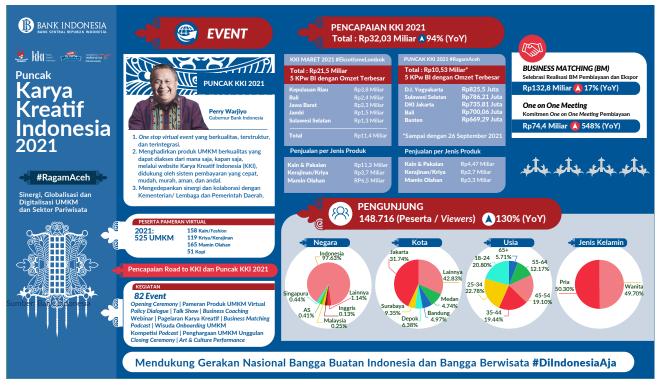


Sumber: Bank Indonesia

Dengan dukungan sinergi yang erat, rangkaian kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) tahun 2021 yang diselenggarakan Bank Indonesia menjadi momentum kebangkitan UMKM di era pandemi Covid-19. KKI 2021 mengangkat tema "Sinergi, Globalisasi, dan Digitalisasi UMKM dan Sektor Pariwisata". Seri 1 KKI pada bulan Maret 2021 diselaraskan dengan peran Bank Indonesia sebagai movement manager Gernas BBI 2021 dengan tagar #EksotismeLombok, bersinergi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Puncak KKI 2021 diselenggarakan tanggal 23-26 September dengan tagar #RagamAceh dan dibuka oleh Ibu Negara, sukses menjadi momentum kebangkitan UMKM di era pandemi untuk mendorong UMKM

digital dan UMKM ekspor. Capaian KKI 2021 yang meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik dari sisi omzet (94%), jumlah pengunjung (130%), serta realisasi business matching ekspor dan pembiayaan (17%), serta komitmen pembiayaan (548%), mencerminkan membaiknya kinerja UMKM dan optimisme untuk bangkit setelah melewati badai pandemi (Gambar 3.7). Koordinasi dengan K/L yang semakin erat dan intensif, memberikan nilai tambah dalam peningkatan kapasitas, akses pemasaran, serta akses pembiayaan UMKM, serta meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam membeli produk-produk UMKM.

Gambar 3.7. Pencapaian KKI 2021



Penguatan Kebijakan Internasional

Kebijakan Internasional Bank Indonesia dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah, yang ditujukan untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan ekonomi **Indonesia.** Kerja sama internasional dan regional Asia terus diperkuat untuk meningkatkan resiliensi perekonomian dan mendukung pertumbuhan. Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan kerja sama internasional termasuk dalam rangka Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI). Saat ini Bank Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Singapura, serta perjanjian repo dengan the Fed New York dan BIS. Upaya untuk meningkatkan persepsi positif investor global dan lembaga rating terhadap perekonomian Indonesia terus dilanjutkan. Bank Indonesia juga mendorong percepatan implementasi penggunaan LCS dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra, dengan memperkuat sinergi bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, dan dunia usaha. Selain itu, penguatan kerangka LCS telah dilakukan pada skema LCS Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Jepang, sementara perluasan negara mitra LCS ditempuh dengan implementasi LCS Indonesia-Tiongkok pada September 2021. Bank Indonesia juga meningkatkan kerja sama dalam rangka pengembangan sistem keuangan dan/atau sistem pembayaran untuk mendorong transaksi yang efisien, aman dan mendorong inovasi keuangan digital serta memperkuat kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui kesepakatan dengan bank sentral Thailand, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Bank Indonesia berperan aktif dalam memperkuat persepsi positif internasional, khususnya lembaga rating dan investor asing, terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dilakukan melalui komunikasi dan engagement yang intensif dengan lembaga pemeringkat dan investor asing secara reguler, khususnya Investor Conference Call setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan, maupun setiap terdapat kebijakan strategis yang perlu dikomunikasikan. Promosi investasi dan perdagangan juga dilakukan melalui Investor Relation Unit (IRU) baik nasional, daerah, dan global, melalui kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), serta Kedutaan Besar RI di luar negeri. Selama tahun 2021 misalnya, Bank Indonesia bekerja sama dan berpartisipasi aktif memfasilitasi kegiatan promosi investasi pada Indonesia Business and Investment Forum di Shanghai, Indonesia Investment Forum di London, New York Now, serta London Coffee Festival.

Bank Indonesia juga terus meningkatkan pengakuan internasional sebagai bank sentral terbaik di antara negara emerging markets. Hal ini dilakukan melalui peningkatan representasi Bank Indonesia, baik melalui membership maupun chairmanship, di berbagai forum kerja sama internasional. Selain itu, peningkatan reputasi Bank Indonesia diwujudkan dengan perolehan international awards dari lembaga internasional dengan reputasi tinggi, penerapan sejumlah standar internasional, publikasi riset dan jurnal yang bertaraf internasional, maupun menjadi referensi dan narasumber dalam berbagai international event yang strategis. Pada tahun 2021, Bank Indonesia memperoleh penghargaan internasional sebagai Reserve Manager of the Year dari Central Banking Awards, medali emas pada ajang 15th Annual Next Generation Contact Center & Customer

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021



Engagement Conference, Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific dari The Asian Banker Regulation and Supervision Awards 2021, medali emas pada Annual Report Competition, dan medali emas pada International Business Awards (IBA) Stevie Winner.

Sinergi kebijakan yang ditempuh masih dihadapkan tantangan dalam penanganan Covid-19 di tengah merebaknya varian baru, yang berdampak pada belum kuatnya permintaan domestik. Beberapa faktor menjadi tantangan dalam upaya mendorong akselerasi permintaan domestik dan pemulihan ekonomi. Pertama, pasokan dan distribusi vaksin global yang relatif terbatas sehingga menghambat upaya mendorong akselerasi vaksinasi yang merupakan prasyarat pemulihan ekonomi. Kedua, penyebaran Covid-19 yang kembali meningkat, terutama munculnya varian baru termasuk varian delta yang lebih cepat dan lebih ganas, berdampak pada penerapan kembali pembatasan mobilitas yang disertai dengan tertahannya mobilitas dan aktivitas ekonomi. Ketiga, disiplin dalam penerapan protokol Covid-19 yang perlu terus ditingkatkan

sebagai bagian dari upaya memitigasi risiko lebih lanjut penyebaran Covid-19. Penyebaran varian delta Covid-19 yang di luar prakiraan di tengah masih berlangsungnya upaya penguatan akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 berdampak pada pelaku ekonomi, baik rumah tangga, korporasi, maupun perbankan, untuk berhati-hati dan menunda keputusan ekonomi, baik konsumsi, produksi, dan investasi. Hal ini berdampak pada belum kuatnya permintaan domestik, yang pada gilirannya berdampak pada penyaluran kredit perbankan yang meningkat terbatas, di tengah kapasitas perbankan dalam penyaluran yang sangat memadai sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia dalam bentuk penurunan suku bunga dan injeksi likuiditas yang besar, serta relaksasi kebijakan makroprudensial. Langkah-langkah lanjutan dalam akselerasi vaksin dan penanganan Covid-19 yang disertai pembukaan sektor prioritas, diharapkan akan berdampak positif pada terkendalinya penyebaran Covid-19, sehingga pembukaan sektor prioritas yang lebih luas dapat dilakukan untuk mendorong lebih jauh aktivitas ekonomi.

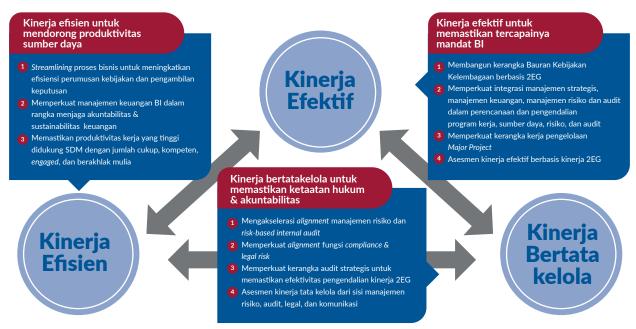
Transformasi Bank Indonesia

Transformasi menyeluruh yang ditempuh Bank Indonesia sejak tahun 2018 terus diperluas dan diperkuat, baik transformasi kebijakan maupun transformasi kelembagaan, termasuk dalam menyikapi cepatnya digitalisasi. Hal ini sejalan dengan visi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral digital terdepan dalam berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju. Untuk itu, Bank Indonesia telah menyusun Strategic Business Plan (SBP) hingga 2025 baik untuk Bank Indonesia secara keseluruhan maupun untuk masingmasing 12 program strategis. Transformasi kebijakan Bank Indonesia dilakukan melalui penguatan bauran kebijakan dalam rangka menjalankan mandat Undang-Undang untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah (inflasi dan nilai tukar), turut menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Independensi Bank Indonesia diletakkan sebagai bagian dalam sinergi dan koordinasi dalam memperkuat kebijakan ekonomi nasional. Dalam implementasinya, Bank Indonesia telah memelopori penerapan bauran kebijakan bank sentral (central bank policy mix) antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial sehingga dapat lebih optimal dalam mencapai stabilitas moneter, sistem keuangan dan makroekonomi serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di bidang sistem pembayaran, transformasi kebijakan dilakukan melalui implementasi BSPI 2025 untuk mendorong akselerasi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Percepatan pendalaman pasar uang sesuai BPPU 2025 dilakukan melalui pengembangan instrumen pasar uang dan infrastruktur pasar keuangan guna menciptakan pasar uang modern dan maju. Sinergi dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah terus diperkuat baik antara kebijakan moneter dan fiskal maupun dalam

akselerasi reformasi sektor riil. Selain itu, sinergi dan koordinasi Bank Indonesia dalam KSSK juga semakin erat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi dunia usaha. Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, KSSK serta industri perbankan dan sistem pembayaran juga terus diperluas untuk pendalaman pasar keuangan dan mempercepat integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional.

Transformasi kelembagaan juga terus diperkuat sebagai langkah nyata untuk membangun Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral dengan kinerja yang unggul. Hal ini untuk mendukung pencapaian dan memastikan terlaksananya mandat Bank Indonesia secara kredibel. Transformasi kelembagaan melalui bauran kebijakan kelembagaan ditujukan untuk mewujudkan kinerja unggul yang berbasis kinerja efektif, kinerja efisien, dan kinerja bertata kelola (2EG) (Gambar 3.5). Hal ini diperlukan sebagai langkah dalam menciptakan keseimbangan antara memastikan tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik. Transformasi kelembagaan mencakup area dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta transformasi digital. Transformasi organisasi dijalankan melalui: (i) perumusan bauran kebijakan kelembagaan yang dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan governed/bertata kelola, (ii) integrasi fungsi strategis kelembagaan yakni Strategic Management, Strategic Finance, Strategic Risk Management, Strategic Risk Based Internal Audit, serta fungsi pengelolaan sumber daya nonkeuangan, (iii) penyempurnaan framework audit untuk pengendalian internal, (iv) penguatan pengelolaan risiko, serta (v) penguatan fungsi pengadaan barang dan/atau jasa, dan pengelolaan aset.

Gambar 3.8. Transformasi Kelembagaan



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia melanjutkan transformasi SDM untuk mencapai SDM berkinerja unggul di era digital, disertai dengan transformasi digital baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Transformasi SDM dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, dan Pemeliharaan SDM. Transformasi pada area perencanaan terefleksi dari perencanaan SDM yang tidak lagi hanya fokus pada aspek kuantitas (jumlah) namun aspek kualitas. Transformasi pada area pemenuhan dilakukan melalui pemenuhan sesuai kebutuhan organisasi yang dilakukan secara Transparan, Terprogram, dan Terjadwal. Transformasi pada area pengembangan dilakukan melalui penerapan konsep Program Tugas Belajar baru (new PTB) dengan prinsip institutional

driven, dikelola secara end-to-end, dan selaras dengan manajemen karier pegawai. Transformasi pada area pemeliharaan dilakukan untuk menjaga dan memelihara motivasi kerja dan engagement pegawai. Sementara itu, transformasi digital diterapkan secara menyeluruh baik di area kelembagaan maupun kebijakan. Transformasi tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem (toolset), peningkatan SDM (mindset dan skill set), serta menjaga kualitas dan keandalan layanan sistem informasi (SI). Semua hal tersebut ditempuh untuk mewujudkan visi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral digital terdepan dalam berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju.